



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 2.6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
MUSEUM GUNUNGAPI MERAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelayanan Museum Gunungapi Merapi pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Gunungapi Merapi;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD Kabupaten dan berdasarkan hasil konsultasi Gubernur sebagaimana tertuang dalam Surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 061/22135 tanggal 11 Desember 2017 perihal Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), perlu menetapkan UPTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan



Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPTD pada dinas, UPTD pada badan, rumah sakit, dan pusat kesehatan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Gunungapi Merapi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan  
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017  
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang  
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11  
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  
Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah  
Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan  
Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111)  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah  
Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang  
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman  
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan  
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman  
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020  
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman  
Nomor 157);
  8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.5 Tahun 2020 tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta  
Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) (Berita  
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2.5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM GUNUNGAPI  
MERAPI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah  
satuan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional  
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas atau Badan.
2. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Museum Gunungapi Merapi pada  
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman.



3. Satuan organisasi adalah subbagian dan kelompok jabatan fungsional lingkup UPTD Museum Gunungapi Merapi pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman.
4. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup UPTD Museum Gunungapi Merapi pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.
8. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) adalah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah membentuk UPTD Museum Gunungapi Merapi.
- (2) UPTD Museum Gunungapi Merapi merupakan unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan).
- (3) UPTD Museum Gunungapi Merapi merupakan UPTD kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) UPTD Museum Gunungapi Merapi dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPTD Museum Gunungapi Merapi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) bidang pelayanan Museum Gunungapi Merapi.



- (3) UPTD Museum Gunungapi Merapi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja;
  - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan museum;
  - c. pelayanan museum;
  - d. pemeliharaan dan perawatan koleksi, sarana, dan prasarana museum;
  - e. pemungutan, pencatatan, dan pelaporan retribusi museum;
  - f. pelaksanaan usul rehab atau pembangunan museum;
  - g. pengelolaan keamanan dan kebersihan;
  - h. pelaksanaan ketatausahaan;
  - i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Museum Gunungapi Merapi terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Museum Gunungapi Merapi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.



## Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi dan informasi;
- d. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- e. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- f. pelaksanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- g. pengoordinasian penyusunan rencana kerja UPTD;
- h. pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.

## Bagian Kedua

### Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Museum Gunungapi Merapi terdiri dari jabatan fungsional tertentu dan/atau jabatan fungsional umum.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional pelayanan UPTD Museum Gunungapi Merapi sesuai dengan ketrampilan/keahlian.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

## BAB V

### TATA KERJA

## Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.



#### Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha membantu Kepala UPTD dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala UPTD, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

#### Pasal 10

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai langkah pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

#### Pasal 11

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan untuk dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Museum Gunungapi Merapi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.17 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD Museum Gunungapi Merapi (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 38.17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.  
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.  
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

cap/ttd

SUMADI

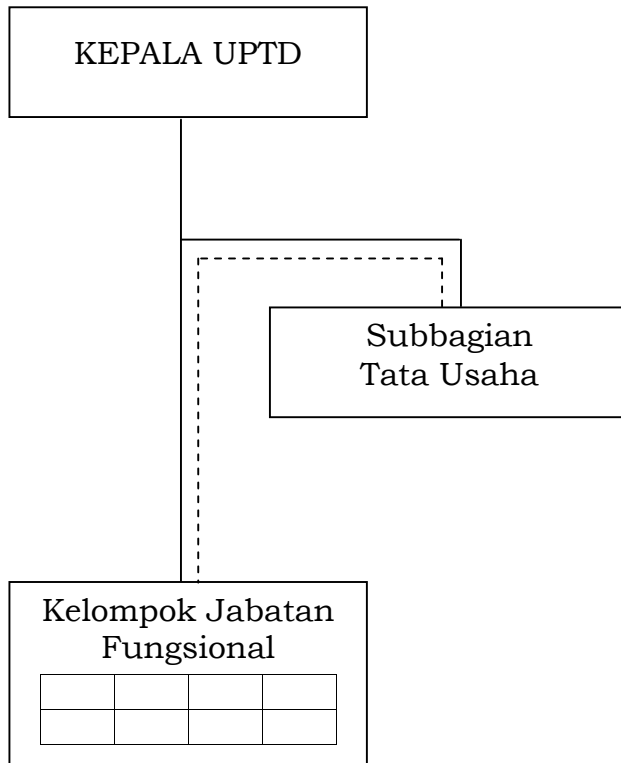
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 2.6





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 2.6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
MUSEUM GUNUNGAPI MERAPI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD MUSEUM GUNUNGAPI MERAPI



- : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

